

## PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP

Kode Outcome<sup>1)</sup> :  
 Pernyataan Outcome<sup>2)</sup> : Meningkatnya efektivitas pengendalian korupsi pada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja <sup>3)</sup>	:	Jumlah K/L/P dengan efektivitas pengendalian korupsi baik
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	:	<p>IEPK merupakan komposit dari tiga pilar yang merepresentasi pengelolaan risiko korupsi secara komprehensif dan berada dalam perspektif GRC. Pilar pertama adalah kapabilitas yang merupakan interseksi antara kapasitas, <i>power</i>, sumber daya, dan kompetensi lembaga yang menjadi kekuatan dari dalam (<i>inside out</i>) yang memungkinkan organisasi mengelola risiko korupsi secara efektif. Pilar ini bertumpu pada komitmen puncak yang ditunjukkan dengan adanya kebijakan, struktur, metoda, dan dukungan sumber daya yang eksplisit untuk tujuan mengelola risiko korupsi. Asesmen risiko korupsi secara komprehensif dan pengembangan infrastruktur <i>cegah &amp; deteksi</i>, seperti sistem antisuap dan WBS, misalnya, menandai keberadaan kapabilitas ini.</p> <p>Pilar kedua adalah <i>implementedness</i> dari strategi cegah dan deteksi, yakni seberapa konkret strategi pencegahan diterapkan. Pilar ini menunjukkan seberapa jauh budaya organisasi antikorupsi tumbuh sebagai buah atas pengembangan kapabilitas di pilar satu. Pilar ini ditandai dengan tingkat kepedulian, transparansi, dan partisipasi pegawai/ stakeholder dalam WBS, serta keberadaan kepemimpinan etis dan iklim etis yang dirasakan pegawai dan <i>stakeholder</i>.</p> <p>Pilar ketiga adalah dimensi respon, yaitu melihat seberapa jauh konsistensi pengelolaan risiko korupsi diwujudkan. Sistem investigasi, tindakan korektif, termasuk sanksi kepada pelaku, serta frekuensi dan signifikansi peristiwa korupsi yang terjadi dan/atau persepsi korupsi menjadi penanda efektivitas pada pilar ketiga.</p> <p><b>IEPK berskala 1 s.d. 10, dengan 1 bermakna mutlak takefektif dan 10 mutlak efektif. Efektivitas pengendalian korupsi dikatakan baik adalah pemaknaan atas kenaikan angka indeks dari waktu ke waktu dan/atau IEPK berada di angka 7 ke atas.</b></p> <p>Latar belakang model pengukuran dalam wujud IEPK dikembangkan dengan argumen di bawah ini.</p> <p>Berbagai inisiatif pencegahan dan pengendalian korupsi telah dilakukan BPKP melalui aneka instrumen pengawasan, mulai GCG, MR, hingga instrumen yang berfokus pada risiko korupsi, seperti FCP, FRA, dan MPAK. Pada pendekatan represif, BPKP melakukan AI, PKKN, atau ATT lainnya bidang investigasi.</p> <p>Ketiga strategi dilakukan BPKP dalam rangka membantu instansi mengelola risiko korupsi. Strategi represif melalui beberapa bentuk audit dilakukan sebagai bagian dari</p>

		<p>konsistensi penegakan aturan yang diharapkan memberikan efek <i>deterrence</i> serta munculnya tindakan korektif. Strategi preventif dan edukatif diwujudkan dalam berbagai aktivitas fasilitasi dan bimbingan teknis sesuai kebutuhan, mulai dari a.l. sosialisasi antikorupsi, pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK), Fraud Control Plan (FCP), FRA, dll.</p> <p>Berbagai upaya di atas, termasuk yang dilakukan oleh lembaga di luar BPKP sepertinya belum terintegrasi dan terukur. Tidak diketahui sampai seberapa jauh kemajuannya dalam kerangka pengelolaan risiko korupsi. Rerangka pengukuran diperlukan untuk itu dengan fungsi utama memberikan landasan bagi penyusunan peta jalan untuk peningkatan efektivitas strategi.</p> <p>Pengembangan model pengukuran indeks EPK oleh BPKP dilakukan untuk memberikan landasan agar ketiga pilar strategi pengendalian korupsi oleh instansi dapat dilaksanakan lebih terukur dan terintegrasi dalam perspektif FRM dan GRC (<i>fraud risk management</i> dan <i>governance-risk-control</i>).</p> <p>Model pengukuran IEPK mengintegrasikan semua upaya manajemen risiko korupsi sekaligus meyakini bahwa upaya tersebut benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian kinerja organisasi ataupun penyelenggaraan program pembangunan yang dimandatkan kepada organisasi.</p> <p>Pengukuran IEPK menyediakan basis data bagi perbaikan tata kelola, peningkatan efektivitas manajemen risiko dan pengendalian korupsi</p>
Kegiatan yg Diperlukan Untuk (Mendukung) Mencapai Target IKU	:	Melakukan komunikasi untuk meningkatkan akseptabilitas (ownership) instansi ttg urgensi pengelolaan risiko korupsi berikut arti penting pengukuran efektivitasnya; membangun dan menyempurnakan metodologi pengukuran yang sederhana, tetapi kredibel, dan berterima, termasuk menjajaki kolaborasi dengan lembaga lain yang memiliki kewenangan dalam strategi pencegahan korupsi. Membangun strategi penugasan kolaboratif dengan unit kerja di kedeputian lain.
Kegiatan pengawasan yg dilakukan	:	Pengukuran IEPK, FCP, FRA, MPAK
Rumus Pengukuran	:	Skor indeks efektivitas pengendalian korupsi yang merupakan komposit skor atas tiga pilar: kapabilitas, keberterapan ( <i>implementedness</i> ) strategi pencegahan, dan penanganan keterjadian.
Hal-Hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ekosistem regulasi antifraud kondusif melalui Perpres No 54 tahun 2018.</li> <li>- PP No 60 tahun 2008 memberikan landasan kewenangan dan kompetensi dalam pembinaan pengendalian internal, bahwa pengukuran EPK dipahami sebagai bagian dari dimensi peningkatan kualitas sistem pengendalian internal pemerintah.</li> </ul>
Hal-Hal yang menghambat pencapaian indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditor yang menguasai kompetensi dan menaruh minat pada penugasan pencegahan dan pengendalian korupsi masih terbatas</li> <li>- Potensi rendahnya akseptabilitas K/L/P atas kegiatan pengukuran efektivitas pengendalian korupsi</li> </ul>

		- Model kerja kolaboratif lintas unit kerja relatif sebuah langkah baru				
Unit Kerja Pelaksana	:	DI, DII, DIII, Perwakilan				
Periode Pengukuran	:	Tahunan				
Baseline (Kondisi Tahun 2019)	:	Tidak ada karena belum pernah dilakukan pengukuran				
Target 2020-2024 <sup>5)</sup> EPK kategori baik.	:	2020	2021	2022	2023	2024
		-	22	37	52	74
Dasar pertimbangan penetapan target	:	Ketersediaan kebijakan berskala nasional adalah prasyarat untuk mendapatkan hasil pengawasan yang berkualitas. Tahun 2020 BPKP masih dalam proses menghasilkan beberapa produk kebijakan (regulasi), termasuk pengukuran efektivitas pengendalian korupsi. Ideal bila kebijakan tersebut sudah diterbitkan saat ini. Namun, kompleksitas permasalahan yang ada membuat kebijakan masih dalam proses pengembangan. Atas dasar itu, tahun 2020 belum ada target BU dengan EPK baik. Angka dalam target adalah angka serealistis mungkin memperhitungkan komposisi sumber daya investigasi <i>existing</i> .				
Sifat Target	:	Kumulatif				
Sumber data	:	Sistem informasi Deputi Bidang Investigasi.				

**Keterangan:**

1. Diisi kode outcome sesuai pohon kinerja
2. Diisi pernyataan outcome sesuai pohon kinerja
3. Diisi pernyataan indikator kinerja sesuai pohon kinerja
4. Diisi uraian mengenai latar belakang, dan penjelasan singkat mengenai indikator kinerja
5. Target diisi beserta satuannya (misalnya %, skala 1-5, dll)

**Catatan:** Profil indikator kinerja dibuat sebanyak indikator kinerja dalam pohon kinerja. Setelah direviu oleh Inspektorat, profil indikator kinerja dapat disahkan oleh Penanggung Jawab pohon kinerja.